

**ANALISIS KEBERLANJUTAN PERKEBUNAN SAWIT
RAKYAT DALAM MENDUKUNG *INDONESIAN SUSTAINABLE
PALM OIL* DI KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN
BANYUASIN**

Rizka Nurjanah¹, Herry Wirianata², Fariha Wilisiani³,
Magister Manajemen Perkebunan INSTIPER, Yogyakarta
rizkanurjanahh@gmail.com, her.wirianata@gmail.com,
farihawilis@gmail.com
085246066957, 082138077000, 085940679820

ABSTRAK

Kata Kunci:
ISPO,
Keberlanjutan,
Kelapa Sawit, Pekebun
Swadaya

Abstrak

Industri kelapa sawit Indonesia telah lama menghadapi kritik dan penyangkalan, tuduhan bahwa industri kelapa sawit tidak berkelanjutan, dan perkebunan rakyat dianggap berkontribusi terhadap resiko lingkungan. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia untuk memastikan keberlanjutan industri kelapa sawit membuat standar keberlanjutan yang disebut ISPO, yang diamanatkan menjadi wajib bagi seluruh perusahaan dan pekebun melalui peraturan presiden nomor 44/2020 dengan tenggang waktu 5 tahun untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun, upaya tersebut dihadapkan pada berbagai permasalahan, terutama bagi petani swadaya. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui realisasi penerapan prinsip dan kriteria ISPO serta mengidentifikasi pencapaian prinsip dan kriteria ISPO pada perkebunan kelapa sawit rakyat di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan pengukuran skala guttman untuk menganalisis realisasi penerapan prinsip dan kriteria ISPO serta mengidentifikasi capaian prinsip dan kriteria ISPO. Dari hasil kajian, realisasi penerapan prinsip dan kriteria ISPO di Kabupaten Tungkal Ilir dari indikator yang tersedia belum terpenuhi dan banyak yang memerlukan perhatian lebih, antara lain pada kriteria legalitas dan pengelolaan pekebun, kriteria kewajiban terkait izin lingkungan, kriteria teknis penerapan budidaya dan transportasi kelapa sawit, dan pada prinsip penerapan transparansi.

**ANALYSIS OF THE SUSTAINABILITY OF SMALLHOLDER OIL
PALM PLANTATIONS IN SUPPORT OF INDONESIAN SUSTAINABLE PALM
OIL IN TUNGKAL ILIR DISTRICT, BANYUASIN REGENCY**

ABSTRACT

ISPO, Sustainability,
Palm Oil, Independent
Smallholders

Abstrak

Indonesia's palm oil industry has long faced criticism and denial, accusations that the palm oil industry is unsustainable, and smallholder plantations are seen as contributing to environmental risks. In response to this, the Indonesian government to ensure the sustainability of the palm oil industry made a sustainability standard called ISPO, which is mandated to be mandatory for all companies and smallholders through presidential regulation number 44/2020 with a grace period of 5 years to fulfill these obligations. However, these efforts are faced with various problems, especially for independent smallholders. Based on the problems faced, the purpose of this study is to determine the realization of the application of ISPO principles and criteria and identify the achievement of ISPO principles and criteria in smallholder oil palm plantations in Tungkal Ilir District, Banyuasin Regency. The research method used is a quantitative descriptive approach with guttman scale measurements to analyze the realization of the application of ISPO principles and criteria and identify the achievements of ISPO principles and criteria. From the results of the study, the realization of the implementation of ISPO principles and criteria in Tungkal Ilir District from the available indicators has not been met and many require more attention, including on the criteria for legality and management of smallholders, criteria for obligations related to environmental permits, technical criteria for the application of oil palm cultivation and transportation, and on the principle of implementing transparency.

PENDAHULUAN

Komoditas andalan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi sumber devisa utama di luar industri migas adalah minyak sawit. Perkebunan kelapa sawit Indonesia berkembang pesat pada tahun 2021, Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, luas perkebunan kelapa sawit mencapai 15,08 juta hektare (ha), di dalamnya termasuk perkebunan sawit rakyat seluas 6,08 juta hektar, perkebunan sawit rakyat mencapai 40,34% dari total luas lahan sawit di Indonesia, apabila dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya misal karet dan kopi, luas perkebunan sawit rakyat memiliki komponen yang cukup strategis dengan luas perkebunan swasta dan perkebunan negara.

Perkebunan rakyat diperkirakan akan terus tumbuh dan menguasai hingga 60% dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia, menjadikannya bagian terbesar dari kewirausahaan kelapa sawit di negara ini. Peningkatan ini diyakini akan mengabaikan standar keberlanjutan, yang dapat menyebabkan hilangnya tutupan dan Kawasan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, terganggunya keseimbangan lingkungan, peningkatan emisi gas rumah kaca, dan munculnya konflik sosial.

Industri kelapa sawit Indonesia telah lama mendapat tuduhan dan penolakan dari sejumlah Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), muncul tuduhan bahwa industri kelapa sawit tidak berkelanjutan (unsustainable), dan perusahaan perkebunan rakyat skala besar maupun kecil dianggap berperan serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi resiko terhadap lingkungan hidup, agar perkebunan kelapa sawit dapat memberikan dampak positif bagi asyarakat, beberapa pihak menuntut perkebunan kelapa sawit dikembangkan secara berkelanjutan.

Sebagai respon, pemerintah Indonesia menetapkan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk memastikan keberlanjutan pengembangan industri kelapa sawit dan menyangkal kampanye negatif yang menyatakan bahwa pertumbuhan perkebunan kelapa sawit Indonesia berdampak buruk terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Melalui Perpres 44/2020, ISPO dimandatkan wajib bagi perusahaan dan pekebun, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan mengatur teknis pelaksanaan sistem sertifikasi ISPO. Pekebun diberikan masa tenggang selama lima tahun sampai tahun 2025 untuk memenuhi kewajiban penerapan prinsip dan kriteria ISPO.

Dalam rangka meningkatkan keberterimaan ISPO pemerintah berkeinginan untuk memperluas cakupan sertifikasi ISPO sampai ke pekebun swadaya. Standar ISPO untuk pekebun memuat 5 prinsip yang harus dipenuhi yaitu: Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan; Penerapan praktek perkebunan yang baik; Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati; Penerapan transparansi; dan peningkatan usaha secara berkelanjutan. Namun terdapat sejumlah

kendala yang menghambat penerapan ISPO, khususnya bagi petani swadaya (smallholder inclusiveness). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana realisasi penerapan prinsip dan kriteria ISPO, serta mengidentifikasi capaian prinsip dan kriteria ISPO diperkebunan sawit rakyat dalam mendukung penerapan konsep perkebunan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka atau angka-angka yang diolah dan dianalisis menggunakan prosedur matematis, dan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini bersumber dari wawancara yang dijawab oleh responden dan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Buku dan Jurnal.

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai bagian dari metode pengumpulan datanya, yang melibatkan penyebaran daftar pertanyaan atau komentar tertulis kepada responden (Sugiyono, 2017). Ada tiga tahap teknik pengumpulan data, yaitu: Pra observasi dan pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui data terkait jumlah petani di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria kelompok usia dan luasan lahan, serta menentukan jumlah sampel responden menggunakan Rumus Slovin $n = \frac{N}{1+N(e)^2}$ n = Jumlah Sampel, N = Jumlah Populasi, e = Batas Toleransi Kesalahan (*error tolerance*). Responden diberikan kuesioner, menggunakan skala guttmien, dan diminta memberi tanda centang disamping pertanyaan yang sesuai dengan penilaian, pada skala guttman memiliki dua tingkat jawaban yaitu “YA” dan “Tidak” jawaban “Ya” mendapat skor satu dan jawaban “Tidak” mendapat skor nol.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu; analisis deskriptif kuantitatif yaitu memberikan gambaran umum mengenai penerapan prinsip dan kriteria ISPO di kelompok tani Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

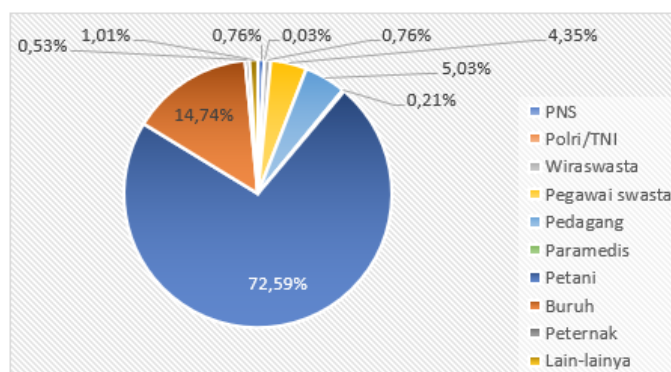
Metode kedua menggunakan tabulasi atau teknik tabularis, yaitu dengan memisahkan jawaban masing-masing responden kemudian menyusunnya sesuai dengan klasifikasi jawaban. Lima tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Proses tabulasi data meliputi memasukkan data yang diperoleh dari responden ke dalam excel dan mengolah atau mentabulasikannya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Menghitung total score berdasarkan jawaban dari petani menggunakan rumus: $\frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah pertanyaan}} \times 100\%$ Jawaban “Ya” memiliki skor 1 dan jawaban “Tidak” memiliki skor 0. Setelah data diolah dan dikategorikan sesuai prinsip dan kriteria ISPO, data disajikan melalui deskriptif naratif yaitu berupa gambaran lengkap tentang prinsip dan kriteria ISPO kepada pekebun sesuai dengan PERMEN NO 30 Tahun 2020, dalam bentuk tabel dan diagram dari hasil penyebaran kuesioner dan

wawancara. Penarikan kesimpulan diambil dari proses analisis data dan juga pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan tersebut memberikan gambaran yang jelas dan spesifik sesuai rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah

Secara administrasi Kecamatan Tungkal Ilir dibagi menjadi 14 (empat belas) Desa dengan luas wilayah keseluruhan adalah 648,14 Km², dengan jumlah penduduk 28 794 jiwa. Masyarakat Kecamatan Tungkal Ilir mayoritas bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhannya, namun ada beberapa juga bekerja dibidang lain, secara lebih jelas ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan
 Dapat dilihat dari tabel 1 masyarakat Kecamatan Tungkal Ilir Sebagian besar bekerja sabagai petani/pekebun dengan jumlah 72,59% dan buruh sebesar 14,74% dan sisanya terbagi menjadi bagian kecil dengan pekerjaan lainnya, dari data tersebut bisa dilihat bahwa banyak masyarakat Tungkal Ilir yang menggantungkan perekonomiannya pada sektor pertanian. Berdasarkan penelitian Fitriyana (2018) di Kabupaten Banyuasin, luas areal persawahan mengalami penurunan pada tahun 2007 hingga tahun 2010. Pada tahun 2007 hingga tahun 2010, luas areal persawahan mengalami penurunan sebesar 52.974 ha, dari 225.237 ha menjadi 172.263 ha. Hal ini berkorelasi negatif dengan luas areal perkebunan yang meningkat sebesar 73.721 ha antara tahun 2007 dan 2010 dari 120.424 ha menjadi 194.145 ha atau meningkat seluas 73.721 Ha oleh sebab itu perlunya pemahaman masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai pekebun tentang prinsip pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan melalui penerapan prinsip dan kriteria ISPO.

Karakteristik Responden

Responden Berdasarkan Umur

Tabel 1. Jumlah dan persentase responden petani sawit kecamatan Tungkal Ilir berdasarkan umur

No	Usia	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	20-45	56	56%
2	46-59	37	37%
3	>60	7	7%
	total	100	100

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa umur responden di daerah penelitian Kecamatan Tungkal Ilir menunjukkan jumlah petani dengan rentang usia 20-45 tahun dengan presentase sebesar 56%, responden berusia 46-59 tahun memiliki presentase 37% dan responden berusia >60 tahun memiliki presentase 7%. Petani yang berada pada usia produktif akan bekerja lebih efektif dan lebih maksimal dibandingkan petani yang tidak pada usia produktif. Namun, petani dengan usia tua lebih memahami kondisi keadaan ladangnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Novia (2011) yang menyatakan bahwa petani yang usianya lebih tua biasanya memiliki kelebihan dalam mengenali kondisi lahan usiha tani namun pemahaman yang relatif kurang.

Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Responden Petani Sawit Rakyat Kecamatan Tungkal Ilir

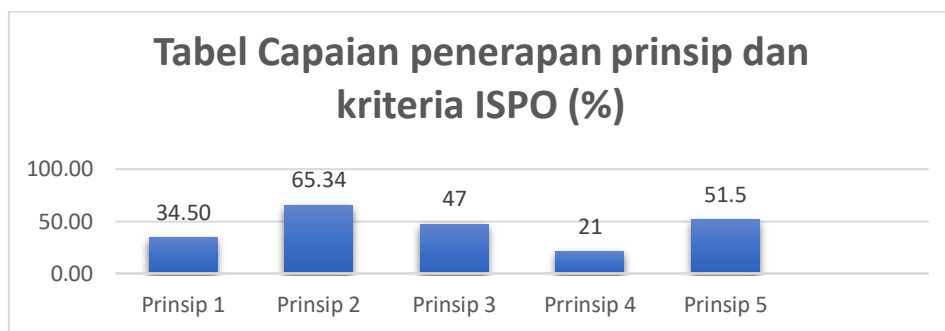
No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	(Tanpa Pendidikan)	6	6%
2	SD	52	52%
3	SMP	26	26%
4	SMA	14	14%
5	Diploma/Sarjana	2	2%
Total		100	100

Berdasarkan data yang diperoleh di daerah Kecamatan Tungkal Ilir dengan tingkat pendidikan 0 (tanpa pendidikan) berjumlah 6%, responden dengan pendidikan sekolah dasar berjumlah 52%, dengan tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 26%, Sekolah Menengah Atas 14%, dan responden dengan pendidikan Diploma/Sarjana 2%. Berdasarkan data tersebut, tingkat pendidikan petani di Kecamatan Tungkal Ilir terbanyak pada tingkat Sekolah Dasar yakni 52%.

Tingkat pendidikan formal dapat mempengaruhi produktivitas usahatani, tingkat melek huruf serta akses informasi, petani dengan tingkat pendidikan tinggi biasanya lebih terbuka dalam menerima inovasi dan lebih cepat dalam menerapkan teknologi baru, dan akan berpengaruh dalam setiap pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh

petani, hal tersebut didukung oleh pernyataan Gusti et al., (2022) petani yang berpendidikan tinggi biasanya memiliki pola pikir yang lebih terbuka dalam menerima inovasi baru dan lebih cepat memahami teknologi baru sehingga dapat maju dan menghasilkan produksi pertanian yang lebih baik. Apabila pernyataan tersebut dikaitkan dengan tingkat pendidikan responden di perkebunan sawit rakyat Kecamatan Tungkal Ilir maka responden tersebut masuk dalam kategori petani dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, sehingga petani lebih sulit menerima informasi, inovasi serta teknologi baru, adapun penyebab banyaknya petani dengan tingkat pendidikan yang masih rendah disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap pentingnya pendidikan formal.

Realisasi Penerapan Prinsip dan Kriteria ISPO

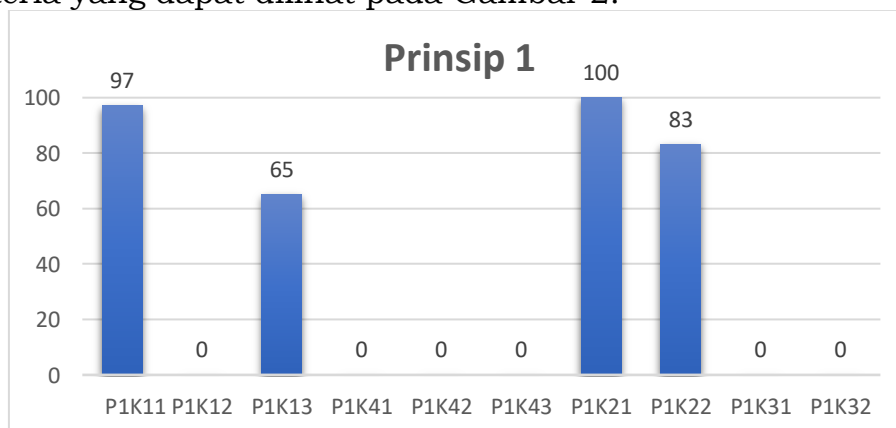


Gambar 2. Capaian penerapan prinsip dan kriteria ISPO di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

Prinsip kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan

Menurut pendapat Fahamsyah & Pramudya (2017) konsep dasar *sustainability* dalam pengelolaan dan pengembangan kelapa sawit di Indonesia dapat diukur dari tingkat kepatuhan atau penerapan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.

Penerapan prinsip kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan terbagi pada kriteria yang dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 3. Capaian penerapan prinsip kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan.

Kriteria Legalitas dan Pengelolaan Pekebun

Penerapan kriteria legalitas dan pengelolaan pekebun di Kecamatan tungkal ilir belum memenuhi prinsip dan kriteria ISPO dapat dilihat dari indikator pekebun memiliki sertifikat tanah, akta jual beli tanah, girik, ataupun bukti kepemilikan lainnya yang sah sebesar 97% dari total keseluruhan responden, pekebun yang tidak memiliki sertifikat tanah mereka menggarap lahan milik desa ataupun lahan milik orang lain.

Pada kriteria penerapan kriteria legalitas dan pengelolaan pekebun poin yang harus diperhatikan pada indikator kepemilikan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) di pekebun swadaya Kecamatan Tungkal Ilir adalah 0, sama dengan hasil penelitian (Rose Victorya TS, 2018) dan (Azizah, 2020) pada indikator kepemilikan STD-B hasilnya adalah 0 atau tidak ada satupun pekebun yang memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya, di Kecamatan Tungkal Ilir umumnya pekebun belum mengetahui apa itu STD-B dan fungsinya pekebun juga menganggapnya tidak penting, pekebun yang ingin mengurus STD-B mengeluhkan mahalnya pengambilan titik koordinat sebagai salah satu syarat pembuatan STD-B, namun ada beberapa pekebun yang sudah melakukan pendaftaran STD-B.

Pekebun di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin 65%, namun kelompok tani yang ada tersebut menurut wawancara dengan pekebun tidak aktif hal itu dikarenakan kelompok tani tersebut pada awal terbentuk di gunakan sebagai kelompok tani padi namun lambat laun karena petani padi beralih ke perkebunan sawit, padahal menurut Maihaini & Elfiana (2016) Dalam pertanian organisasi yang tidak kalah pentingnya adalah kelompok tani. Selama ini kelompok tani sudah terbukti menjadi wadah penggerak pengembangan pertanian di pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari manfaat kelompok tani dalam hal memudahkan koordinasi, penyuluhan dan pemberian paket teknologi.

Kriteria Lokasi Pekebun

Indikator lokasi pekebun swadaya sesuai dengan penetapan tata ruang setempat di Kecamatan Tungkal ilir sudah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO hal ini karena kawasan perkebunan sesuai dengan lokasi transmigrasi. Namun untuk capaian akses lokasi kebun menuju tempat pengumpul/pengangkutan TBS memadai (maksimal 24 jam setelah panen, TBS harus sudah diolah) di Kecamatan Tungkal Ilir belum memenuhi prinsip dan kriteria ISPO hal ini karena akses jalan banyak yang rusak, dan apabila musim penghujan karena Kecamatan Tungkal Ilir merupakan daerah pasang surut dan rawan banjir sehingga perlunya diperhatikan akses jalan untuk pekebun.

Kriteria Sengketa Lahan dan Kompensasi Serta Sengketa Lainnya

Indikator tersedia catatan atau kesepakatan penyelesaian sengketa pada kebun swadaya dan tersedia peta lokasi serta tersedia salinan perjanjian yang telah disepakati terkait penyelesaian sengketa termasuk informasi tentang batas-batas kebun yang disengketakan mendapat capaian 0 dapat diartikan bahwa pekebun di Kecamatan Tungkal Ilir tidak pernah terjadi

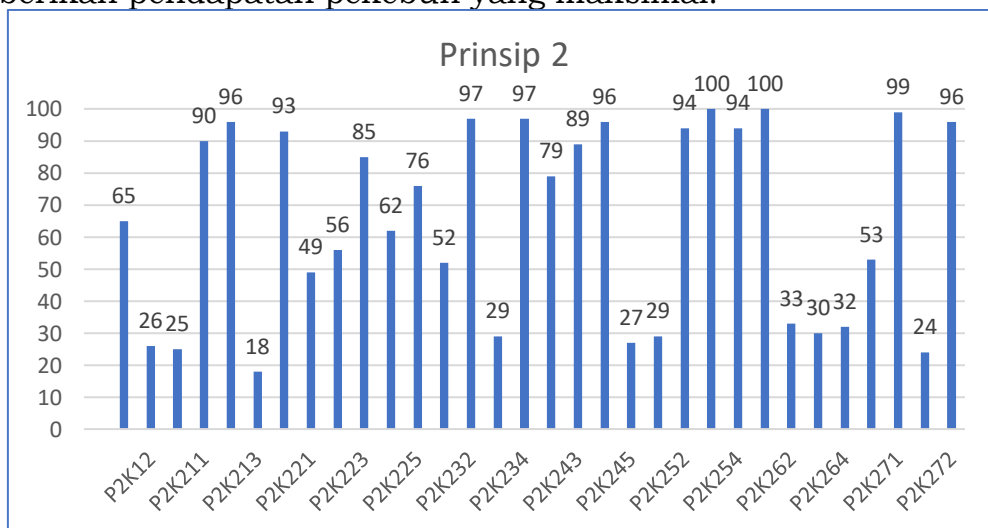
sengketa lahan dan memenuhi prinsip dan kriteria ISPO. Dalam hal ini sengketa dapat berupa sengketa lahan dan sengketa lainya termasuk pertambangan tanpa izin (PETI) dan pertambangan liar, baik dengan perusahaan, masyarakat sekitar kebun dan pihak lainnya, apabila terjadi sengketa dilaksanakan musyawarah oleh pihak yang bersengketa atau difasilitasi oleh pemerintah atau Tim Terpadu Penyelesaian Sengketa, dan apabila penyelesaian sengketa lahan melalui musyawarah tidak menemui kesepakatan maka lahan yang disengketakan diselesaikan melalui jalur hukum.

Kriteria Kewajiban Terkait Izin Lingkungan

Kriteria kewajiban terkait pekebun memiliki dokumen SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) yang merupakan dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa surat yang menyatakan kesanggupan pelaku usaha untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup dari kegiatan usahanya yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dan pelaporan pelaksanaan SPPL kepada instansi terkait di Kecamatan Tungkal Ilir belum memenuhi prinsip dan kriteria ISPO, dikarenakan tidak ada pekebun yang memiliki SPPL, menurut hasil wawancara pekebun tidak mengetahui apa itu SPPL dan sampai saat ini pekebun belum memerlukan dokumen tersebut sehingga pekebun tidak mencari ataupun membuat surat pernyataan pengelolaan lingkungan.

Prinsip Penerapan Praktek Perkebunan Yang Baik

Prinsip penerapan praktek perkebunan yang baik (Good Agricultural Practices/GAP) harus dilakukan oleh kelompok pekebun agar dapat mewujudkan peningkatan kualitas dan produktifitas kelapa sawit, serta memberikan pendapatan pekebun yang maksimal.



Gambar 4. Capaian penerapan prinsip penerapan praktek perkebunan yang baik.

Kriteria Organisasi Kelembagaan Pekebun

Hasil penelitian menunjukkan pekebun di Kecamatan Tungkal Ilir

Kabupaten Banyuasin untuk indikator pekebun swadaya tergabung dalam kelompok tani dan koperasi sebagai wadah bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan anggota tidak memenuhi prinsip dan kriteria ISPO, kelompok tani yang ada saat ini menurut wawancara dengan pekebun tidak aktif, hal itu dikarenakan kelompok tani yang sudah ada pada awal terbentuk sebagai kelompok tani padi namun lambat laun karena petani padi beralih ke perkebunan sawit akhirnya kelompok tani disamakan, padahal dengan adanya kelompok tani dan koperasi akan menjadi wadah bersama untuk memenuhi aspirasi dalam kebutuhan anggota. Pada indikator pekebun memiliki dokumen rencana kegiatan operasional pekebun dan laporan kegiatan operasional pekebun juga tidak memenuhi syarat prinsip dan kriteria ISPO. Pekebun yang memiliki dokumen rencana operasional dan laporan kegiatan adalah pekebun yang sudah mengikuti Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan pekebun yang mempunyai inisiatif sendiri karena dianggap perlu melakukan pencatatan. Masyarakat umumnya belum merasakan manfaat dari adanya kelompok tani dan sampai sekarang merasa belum belum membutuhkan atau masih berjalan mandiri, menurut pendapat Tampubolon et al.,(2021) keberadaan kelompok tani mempunyai manfaat sebagai wadah untuk mendapatkan modal dan pembiayaan selain itu dapat membantu dalam meningkatkan jumlah produksi dan dan kualitas buah sawit yang dihasilkan masyarakat.

Kriteria Penerapan Teknis Budidaya Dan Pengangkutan Kelapa Sawit Pembukaan Lahan

Tidak terpenuhinya Indikator pelaksanaan pedoman pembukaan lahan tanpa bakar dikarenakan pekebun yang masih membuka lahan dengan cara dibakar, ada pekebun yang belum mengetahui bahaya pembukaan lahan dengan dibakar ataupun pekebun yang sudah lanjut usia, namun dengan terbitnya undang-undang No.18 tahun 2004 tentang perkebunan, dimana pada pasal 26 disebutkan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, telah membuat pihak perkebunan ataupun pekebun mau tidak mau harus mempertimbangkan pengolahan lahan dengan tanpa bakar atau *zero burning* (Mujayana et al., 2020). Indikator pekebun swadaya dalam membuka lahan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi lahan dan air, lahan yang memerlukan konservasi dilakukan dengan sistem drainase dan terasering juga belum memenuhi prinsip dan kriteria ISPO, indikator penanaman tanaman pelindung (*cover crop*) di Kecamatan Tungkal Ilir juga tidak memenuhi prinsip dan kriteria ISPO hal ini dikarenakan pekebun terkendala biaya untuk membeli tanaman pelindung, selain itu tanah di Kecamatan Tungkal Ilir mengandung zat asam dan menjadi langganan banjir oleh sebab itu tanaman pelindung tidak dapat hidup, sedangkan menurut pendapat (Ma'ruf, 2017) aplikasi LCC merupakan cara yang tepat untuk optimalisasi potensi lahan dan keramahan lingkungan. Penanaman LCC mampu memperbaiki kesuburan tanah, menekan pertumbuhan gulma di areal penanaman, meningkatkan

ketersediaan karbon dan nitrogen dalam tanah, serta mengurangi laju erosi.

Pembenihan

Pemenuhan

kriteria pembenihan pada sub kriteria benih tanaman berasal dari sumber benih yang direkomendasikan oleh pemerintah dan bersertifikat dari instansi yang berwenang pekebun tidak memenuhi prinsip dan kriteria, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pekebun tidak menggunakan bibit bersertifikat diantaranya adalah rendahnya pemahaman pekebun terhadap bibit bersertifikat, akses pekebun terhadap bibit bersertifikat kurang, harga bibit bersertifikat yang dirasa pekebun cukup mahal tidak bisa dijangkau, dan bibit tidak bersertifikat/palsu/ bisa beredar dengan cara mudah dan murah, menurut Pinem & Pratiwi (2020) Semakin tinggi mutu benih yang digunakan maka semakin besar produksi yang dihasilkan. Sertifikat benih merupakan salah satu bentuk pembangunan pembenihan. Sistem pengawasan mutu dan sertifikasi benih yang handal dapat melindungi keaslian varietas dan kemurnian genetik, baik yang diproduksi oleh produsen maupun yang digunakan oleh konsumen di lapangan agar sesuai dengan standar mutu benih yang berlaku. Benih yang bermutu tinggi diharapkan menjadi salah satu jaminan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hasil pertanian yang berdaya saing, dan pada akhirnya bisa berdampak positif terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani. Pekebun di Kecamatan Tungkal Ilir untuk indikator areal pembibitan memiliki topografi yang rata dan berada dekat dengan areal penanaman serta bebas banjir, lokasi pembibitan dekat dengan sumber air yang mengalir sepanjang tahun, akses lokasi pembenihan yang memiliki akses jalan yang baik sehingga memudahkan dalam pengawasan, dan lokasi pembibitan terhindar dari gangguan hama penyakit, ternak, dan manusia semua belum tercapai untuk memenuhi prinsip dan kriteria ISPO, banyak hal yang harus diperhatikan untuk memenuhi prinsip dan kriteria tersebut terutama mengenai pemahaman pekebun pentingnya bibit bersertifikat, dan cara pembibitan sesuai SOP.

Penanaman Pada Lahan Mineral

Hasil penelitian menunjukkan indikator pekebun memiliki SOP penanaman dengan acuan *Good Agricultur Practice* (GAP) tidak terpenuhi, pekebun yang sudah memiliki dan mengetahui SOP GAP adalah pekebun yang mengikuti Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan pekebun yang memiliki inisiatif karena ingin produksi sawitnya meningkat dengan cara mencari SOP di internet, tidak terpenuhi juga prinsip dan kriteria ISPO pada indikator pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanam sesuai dengan kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan yang baik, pekebun menggunakan jarak tanam 8 m x 9 m, selain itu pada indikator pekebun mempertahankan jumlah tanaman sesuai standar yang ditetapkan dengan melakukan sisipan tidak terpenuhi, kegiatan pekebun juga belum terdokumentasi untuk pencatatan pelaksanaan penanaman karena tidak terpenuhinya indikator tersebut.

Pemeliharaan Tanaman

Berdasarkan hasil penelitian indikator pekebun melakukan pembuatan piringan/tapal kuda, penempatan tua (pruning) sebagai guludan bahan organik pada gawangan tidak memenuhi prinsip dan kriteria ISPO, masih banyak pekebun yang belum melakukan pembuatan piringan/tapal kuda pada kebun yang dikelola, terpenuhi prinsip dan kriteria ISPO pada indikator pekebun swadaya melakukan pemupukan pada tanaman sawit, pekebun melakukan pemupukan tanaman 1 tahun 2 kali atau 3 kali tergantung pada ketersediaan pupuk dan keadaan ekonomi pekebun, sedangkan pada indikator pekebun melakukan pemeliharaan terasering dan tinggi muka air (drainase), pekebun melakukan pemeliharaan piringan, melakukan sanitasi kebun dan penyiangan gulma semua belum ada yang memenuhi prinsip dan kriteria ISPO, menurut pendapat Gustiana et al., (2018) perawatan piringan dengan cara pengendalian gulma pada piringan tanaman kelapa sawit dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya saingan terhadap tanaman pokok, memudahkan pelaksanaan pemeliharaan dan mencegah berkembangnya hama dan penyakit tertentu, dan masih banyak pekebun yang belum memiliki laporan kegiatan pemeliharaan tanaman karena pada penelitian ini sub kriteria pekebun memiliki laporan kegiatan pemeliharaan tidak terpenuhi.

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan

Menurut hasil penelitian capaian indikator pekebun memiliki petunjuk teknis dan pengendalian hama terpadu tidak terpenuhi, juga tidak terpenuhinya indikator pekebun melakukan pengendalian hama terpadu melalui teknik budidaya, kebersihan kebun, pengurangan musuh alami secara mekanis, dan menggunakan pestisida secara terbatas dan. hal ini karena pekebun banyak mencari tahu sendiri melalui internet maupun belajar dari pengalaman. Terpenuhi prinsip dan kriteria ISPO pada indikator pestisida yang digunakan pekebun dikecamatan Tungkal Ilir telah terdaftar dikomisi pestisida kementan, namun pada indikator pekebun memiliki ruang penyimpanan alat dan bahan kimia pengendali OPT tidak terpenuhi masih banyak pekebun yang mencampur ruang penyimpanan bahan kimia dengan ruang pada rumah utama.

Pemanenan

Hasil penelitian menunjukkan terpenuhinya indikator buah yang dipanen adalah buah matang panen dan dilakukan pada waktu yang tepat sesuai pedoman teknis panen. Menurut Krisdiarto et al., (2017) di dalam industri minyak kelapa sawit, ketersediaan TBS kelapa sawit sebagai bahan baku minyak kelapa sawit harus dipertahankan kuantitas dan kualitasnya. Ketepatan metode panen akan menjamin kuantitas produksi, sedang ketepatan waktu panen akan menghasilkan TBS dengan mutu baik (Pahan, 2006).

Namun pada indikator ketersediaan SOP penetapan kriteria matang panen dan putaran panen sesuai petunjuk teknik, pekebun melakukan pencatatan untuk waktu dan lokasi panen, untuk pencatatan penyiapan tenaga kerja, peralatan dan sarana penunjang mendapat ketercapaian, pencatatan hasil panen pekebun semua belum terpenuhi, pekebun hanya mengandalkan ingatan dan kebiasaan yang sudah berjalan seperti biasanya sehingga tidak terdokumentasi dengan baik.

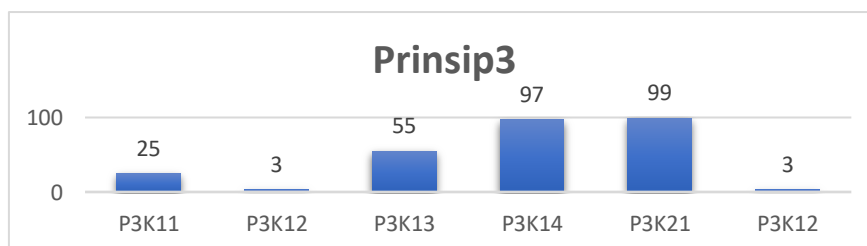
Pengangkutan Buah

Hasil penelitian menunjukkan indikator tersedia alat transportasi serta sarana pendukung tidak terpenuhi pekebun mengangkut hasil panen menggunakan motor sampai pada titik pengumpulan TBS namun ada pekebun yang tidak memiliki alat transportasi dan harus mengangkutnya secara manual atau menggunakan tenaga manusia, tidak terpenuhi indikator jarak kebun ke pabrik pengolah dapat menjamin kualitas buah tetap baik, buah akan dipanen pada pagi hari dan akan dikirim ke pabrik pada sore hari, namun ada beberapa hambatan apabila kondisi cuaca sedang tidak baik karena akses jalan yang tidak bagus dan sering terjadi banjir. Pada indikator pekebun melakukan pencatatan untuk jumlah pengangkutan TBS dan nama serta lokasi pabrik tidak memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.

Secara keseluruhan ketercapaian prinsip 2 penerapan teknis budidaya dan pengangkutan kelapa sawit di Kecamatan Tungkal Ilir hanya 3 indikator yang memenuhi prinsip dan kriteria ISPO, dalam artian masih banyak hambatan yang dialami oleh pekebun dan memerlukan banyak evaluasi, perbaikan serta perhatian khusus terutama untuk sub kriteria pembenihan dan indikator pencatatan laporan baik pembenihan, perawatan tanaman maupun panen, pada pengujian reliabilitas kuisisioner mendapat hasil reliabel, hal itu menunjukkan bahwa kuisisioner atau hasil dari wawancara dengan reponden dapat dipercaya.

Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam, Dan Keanekaragaman Hayati

Perencanaan lingkungan hidup, pemanfaatan lingkungan hidup, pengendalian lingkungan hidup, pemeliharaan lingkungan hidup, pengawasan lingkungan hidup, dan penegakan hukum lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan lingkungan hidup



Gambar 5. Capaian penerapan prinsip pengelolaan lingkungan hidup sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan merupakan salah satu prinsip dan kriteria penerapan ISPO untuk kebun swadaya. Penerapan tanggung jawab terhadap lingkungan pada perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk mendorong perluasan sektor kelapa sawit yang lebih memperhatikan aspek lingkungan sehingga pengelolaan kelapa sawit dapat dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini juga ditujukan untuk menetralkan isu-isu negatif perusahaan kelapa sawit terkait pencemaran lingkungan (Azizah, 2020).

Kriteria Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran

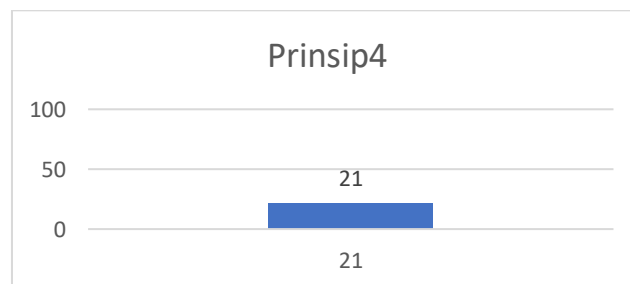
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil dari indikator pekebun memiliki dokumen mekanisme/pedoman SOP pencegahan kebakaran, pekebun mengetahui akan keberadaan menara pantau api dari kedua indikator tersebut belum memenuhi prinsip an kriteria ISPO, pekebun tidak mengetahui bahwa ada menara pantau api di Kecamatan Tungkal Ilir yang mana menara tersebut milik perusahaan, tidak tercapai pada indikator pekebun memiliki peralatan yang memadai untuk pencegahan kebakaran serta memiliki sarana penampungan air (waduk, embung, dan parit).

Kriteria Pelestarian Keanekaragaman Hayati (Biodiversity)

Kriteria 2 pada prinsip ke 3 adalah pekebun mengetahui keberadaan satwa dan tumbuhan di area tersebut dan sekitar kebun, sebelum dan sesudah dimulai usaha perkebunan tidak terpenuhi dan juga tidak terpenuhi pada indikator pekebun melakukan pencatatan terhadap satwa tersebut. Hal ini patut menjadi perhatian baik pekebun maupun dinas terkait karena keragaman flora dan fauna hidup berdampingan secara harmoni pada ruang masing-masing dan harus terus dijaga kelestariannya.

Prinsip Penerapan transparansi

Penerapan transparansi, meliputi pola penjualan dan kesepakatan harga TBS, serta penyediaan data dan informasi. Pekebun memiliki informasi harga TBS berdasarkan penetapan harga yang ditetapkan oleh tim penetapan harga TBS untuk setiap harga yang mengacu pada penetapan harga TBS kelapa sawit produksi perkebunan dan memiliki informasi SOP pelayanan informasi serta mempunyai dokumen pemberian informasi kepada pemangku kepentingan sesuai peraturan yang berlaku.

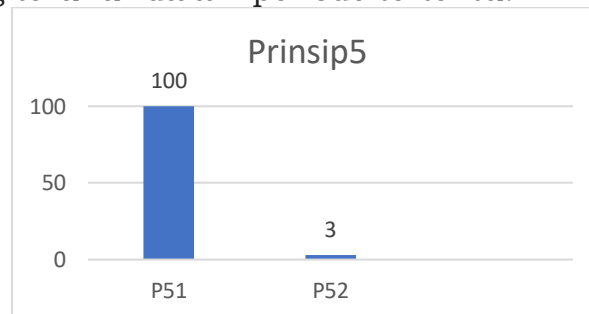


Gambar 6. Capaian prinsip penerapan transparansi

Penerapan prinsip transparansi belum tercapai dalam pekebun memiliki informasi harga TBS berdasarkan penetapan harga yang ditetapkan oleh tim penetapan harga TBS untuk setiap tujuan penjualan, pekebun hanya mengetahui harga dari tengkulak dan tidak mengetahui harga dari pabrik maupun penetapan harga dari DISBUN, prinsip ini seharusnya diwujudkan dengan adanya penyampaian harga TBS secara transparan kepada anggota tercipta kepercayaan dan kelancaran proses penjualan TBS dari anggota melalui kelompok, sedangkan di Kecamatan Tungkal Ilir kelompok tani tidak aktif sehingga hal-hal ini saling berkaitan.

Prinsip Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan

Pada prinsip yang terakhir kriterianya yaitu, adanya sistem pemantauan dan pembaruan masa berlaku dokumen perizinan. Serta terdapat program tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang terukur dalam periode tertentu.



Gambar 7. Capaian penerapan prinsip peningkatan usaha secara berkelanjutan

Berdasarkan penelitian indikator pekebun/kelompok tani melakukan perbaikan secara berkelanjutan tercapai, namun pekebun yang memiliki dokumen hasil penerapan perbaikan/ peningkatan usaha yang berkelanjutan tidak tercapai. Tidak terpenuhinya penerapan ini dikarenakan kurangnya pengetahuan, keahlian serta kemauan pekebun dalam menjalankan dan meningkatkan organisasi. Pekebun yang ada juga belum memenuhi prinsip ini dikarenakan kurang berjalannya bimbingan dari lembaga terkait untuk memenuhi sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, karena menurut keterangan dari pekebun, banyak pekebun yang belum mengetahui tentang ISPO

Secara keseluruhan ketercapaian penerapan prinsip dan kriteria ISPO di Kecamatan Tungkal Ilir masih perlu mendapat perhatian karena dari prinsip dan indikator yang tersedia belum terpenuhi dan banyak yang memerlukan perhatian lebih diantaranya pada kriteria legalitas dan pengelolaan pekebun, kriteria kewajiban terkait izin lingkungan, kriteria penerapan teknis budidaya dan pengangkutan kelapa sawit, dan prinsip penerapan transparansi. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah rendahnya tingkat pendidikan pekebun yang mana sebagian besar pekebun hanya lulus Sekolah Dasar (SD), sisanya sebagian lulusan SMP, SMA dan lainnya. Rendahnya tingkat pendidikan dapat mempengaruhi penerimaan terhadap informasi dan inovasi-inovasi terbaru yang diberikan kepada

pekebun, selain itu pekebun belum banyak tau mengenai ISPO dan manfaatnya, juga belum ada sosialisasi secara menyeluruh kepada pekebun mengenai ISPO, dengan harapan pemangku kebijakan dapat mengambil strategi sehingga pekebun swadaya yang ada di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin dapat menghasilkan produksi yang sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu PERPRES nomor 44 tahun 2020. Dengan harapan pekebun dapat meningkatkan usaha kelapa sawit yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Realisasi penerapan prinsip dan kriteria ISPO di Kecamatan Tungkal Ilir dari indikator yang tersedia belum terpenuhi dan banyak yang memerlukan perhatian lebih diantaranya pada kriteria legalitas dan pengelolaan pekebun, kriteria kewajiban terkait izin lingkungan, kriteria penerapan teknis budidaya dan pengangkutan kelapa sawit, serta pada prinsip penerapan transparansi.

SARAN

Disarankan kepada pemangku kebijakan dapat mengambil langkah sehingga pekebun swadaya yang ada di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin tau akan penting dan kebermanfaatan ISPO terhadap usaha perkebunan kelapa sawit.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahamsyah, E., & Pramudya, E. P. (2017). Sistem ISPO untuk Menjawab Tantangan dalam Pembangunan Kelapa Sawit Indonesia yang Berkelanjutan. *Masyarakat Indonesia*, 43(1),
- Fitriyana, G. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Petani Dalam Melakukan Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Kebun Kelapa Sawit Di Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. *Societa: Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.32502/jsct.v7i1.1128>
- Gusti, I. M., Gayatri, S., & Prasetyo, A. S. (2022). The Affecting of Farmer Ages, Level of Education and Farm Experience of the farming knowledge about Kartu Tani beneficial and method of use in Parakan Distric, Temanggung Regency. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 19(2), 209–221. <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v19i2.926>
- Gustiana, C., Supristiwendi, S., & Siddik, M. (2018). Pengaruh Interval Pembersihan Piringan, Penunasan Dan Biaya Pemupukan Terhadap Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit (*Elaeis Guineensis*, Jack) Di Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Penelitian Agrisamudra*, 5(1), 39–48. <https://doi.org/10.33059/jpas.v5i1.840>
- Krisdiarto, A. W., Sutiarso, L., & Widodo, K. H. (2017). Optimasi Kualitas

Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dalam Proses Panen-Angkut Menggunakan Model Dinamis Optimization of Oil Palm Fresh Fruit Bunch Quality in Harvesting-Transportation Process Using A Dynamic Model. *Jurnal Neliti*, 37(1), 101–107.

Ma'ruf, A. (2017). *Legume Cover Crop di Perkebunan Kelapa Sawit Pyraclostrobin application on tea var. Assamica during the dry season View project* (Issue April).

Maihaini, S., & Elfiana. (2016). Pemasaran Produk Pertanian Berbasis Agribisnis Dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan. *Jurnal Lentera*, 16(18), 63–70. <https://media.neliti.com/media/publications/150151-ID-pemasaran-produk-pertanian-berbasis-agri.pdf>

Mujayana, E., Rosnita, R., & Andriani, Y. (2020). The Adoption of Innovations Zero Burning Land Cultivation by The Community in Rokan Hilir Regency. *Journal of Agribusiness and Community Empowerment*, 3(1), 44–53. <https://doi.org/10.32530/jace.v3i1.97>

Novia, R. A. (2011). Respon Petani Terhadap Kegiatan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) DI Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas *Respon Peta*. 7(2), 48–60.

Pinem, L. J., & Pratiwi, M. (2020). Faktor-Faktor Pendorong Petani Dalam Memilih Benih Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*) Bersertifikat Dan Nonsertifikat. *Agrimor*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.32938/ag.v5i1.853>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tampubolon, J., Ginting, A., & Nainggolan, H. L. (2021). Lembaga Petani Kelapa Sawit Sebagai Wadah Pengembangan Dan Modernisasi Sawit Rakyat Di Desa Kuta Jurung Kecamatan Stm Hilir, Kabupaten Deli Serdang. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 01(02), 136–146. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian/>

